

Posisi Tawar Petahana Paling Kuat

Setelah ditunda akibat pandemi, tahapan pilkada dimulai kembali. Pendaftaran calon ramai jadi perbincangan, mulai dari sosok, dukungan partai hingga kemungkinan peta politik. Seperti apa Pilkada 2020 ini akan berjalan? Berikut perbincangan wawancara *Suara Merdeka* Hari Santoso dengan dosen FISIP Undip Wijayanto PhD.

Pilkada 2020 akan berjalan dengan kondisi seperti apa?

Yang jelas suasana pilkada akan jauh berbeda dibanding pelaksanaan periode sebelumnya. Pandemi korona menjadi penyebabnya. Sejauh ini juga masih muncul perdebatan apakah seharusnya ditunda atau tetap berlanjut.

Saya sebenarnya jadi pihak yang menyarankan untuk ditunda dengan mempertimbangkan ancaman kesehatan. Risikonya terlalu besar. Sejumlah studi baik itu survei kalangan kampus bahkan media menunjukkan pilkada belum siap dilaksanakan di tengah penyebaran wabah. Tunggu dululah sampai pandemi ini benar-benar mereda.

Terlepas dari situasi yang anda khawatirkan siapa saja sosok yang berpeluang tampil dalam panggung politik?

Saya merasa *incumbent* masih akan mempunyai peluang cukup kuat meramaikan agenda pilkada. Mereka ini tentunya juga memiliki mesin partai yang masih memberikan dukungan untuk mencalonkan diri. Selain itu karena posisinya yang boleh dibidang strategis pasti mempunyai kesempatan membina akar dan basis massa secara lebih solid. Petahana memiliki posisi tawar paling kuat dalam kontestasi politik.

Apa yang melatar belakangi mereka begitu percaya diri?

Sebanyak 66 persen calon yang maju mengikuti pertarungan pencalonan wali kota atau bupati kepala di Jateng adalah petahana. Mereka percaya diri karena mengaku masih mendapat dukungan kuat dari konstituen. Selebihnya karena merasa menang pengalaman setelah sebelumnya lolos di periode pertama.

Sejauhmana peluang yang mungkin diraih?

Para peneliti termasuk sejumlah pakar di bidang ilmu politik memastikan kans *incumbent* untuk lolos lagi sangat tinggi.

Pengalaman juga membuktikan banyak petahana yang mencalonkan diri akhirnya lolos melenggang untuk ke dua kali. Contoh semacam ini juga banyak muncul di Jateng.

Benarkah pesta demokrasi kali ini masih tetap dibayangi kekhawatiran pengaruh oligarkhi kekuasaan?

Indonesia mulai menganut sistem desentralisasi dalam pembagian kewenangan di pemerintahan. Namun sayangnya hal ini tidak pernah diikuti oleh parpol termasuk pucuk dan elit pimpinannya. Semua keputusan atas persoalan politik diambil secara sentralisasi oleh elit.

Alhasil kerap muncul riak, gelombang, dan ketimpangan dalam keputusan yang diambil dari Jakarta. Alasan ini cukup menunjukkan oligarki masih akan tetap menjadi batu sandungan dalam mewujudkan sistem demokrasi yang baik dan adil.

Sudahkan parpol dan calon yang akan berkontestasi memenuhi harapan publik?

Melihat beberapa indikasi keterlibatan parpol atau calon kepala daerah selama ini, sepertinya mereka masih belum sepenuhnya memenuhi harapan banyak orang. Ya, ukuran yang dapat dipakai untuk menilai itu salah satunya berkait kemampuan atau setidaknya partisipasi mereka membantu menanggulangi pandemi.

Sulit rasanya mereka berhasil mengatasi atau menekan wabah karena faktanya pandemi masih terus menyebar.

Perluakah pemilih diingatkan risiko politik uang yang acap hadir menyeruak?

Politik uang sepertinya memang masih akan tetap mewarnai perjalanan pesta demokrasi di Indonesia. Meski hal itu seharusnya dihilangkan agar tidak mengotori niat masyarakat memilih wakil atau calon pimpinan daerah yang mempunyai kapasitas memadai.

Namun yang lebih serius untuk diperhatikan dalam tahapan pilkada kali ini yakni risiko muncul kerumunan di era pandemi Covid-19. Kondisi ini tak kalah berbahaya dengan serangan fajar yang acap ditengarai muncul menjelang coblosan.

Kita malah sedang berhadapan dengan politik alam menyusul munculnya wabah yang tak kasat mata namun dampaknya membahayakan bagi kesehatan manusia.

-Haruskah juga diwaspadai kampanye hitam untuk mematikan karakter lawan politik?

Apabila dicermati politik identitas masih terasa sangat kental di Tanah Air. Termasuk juga ketika para calon membuat segala daya upaya untuk menjatuhkan lawan mereka. Yang harus ditekankan yakni semangat berani mengambil sikap legawa atau jujur di dalam setiap pesta demokrasi. Selebihnya mengedepankan watak ksatria dengan tidak menggunakan kampanye negatif terhadap rival politik.

Selain itu harus diingatkan kedewasaan dalam memanfaatkan media sosial. Sebab melalui jejaring media sosial banyak sekali ditemukan persoalan disinformasi yang akhirnya bisa mengarah kesalahan penilaian terhadap mereka yang tidak satu haluan dengan kita.

Yakinkah anda pesta demokrasi yang berlangsung dapat merepresentasikan kepentingan rakyat sebagaimana parameter ideal pesta demokrasi?

Kalau melihat situasinya seperti ini saya merasa kurang yakin. Atau bahkan boleh disebut cukup pesimistis. Sebab, kalau terlalu dipaksakan, bagaimana nantinya dengan risiko yang harus diambil oleh publik sebagai pihak yang akan menikmati hasil pilkada. Pertimbangannya juga karena pandemi korona belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Jangan sampai dengan cara yang sangat dipaksakan justru memunculkan fenomena klaster baru penyebaran virus dan penyakit.

(21)

Wijayanto PhD



□ Pengamat politik FISIP Undip dan Direktur Center for Media and Democracy, LP3ES, Jakarta

□ Pendidikan:

- S1 Ilmu Pemerintahan Undip
- S2 Ilmu Politik Undip dan University of Wyoming, USA (Sandwich Program)
- S3 Ilmu Politik Leiden University.